## RIPLAY VERSI UMUM – KREDIT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Kredit Kepala Desa dan Perangkat Desa



Nama Produk/Layanan	Kredit Kepala Desa dan Perangkat Desa				
Jenis Produk	Kredit Konsumtif				
Data Ringkas		Produk kredit konsumtif yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat			
Data Kiligkas	Desa aktif untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi dengan sistem				
	pembayaran angsuran tetap setiap bulan melalui pemotongan penghasilan				
	tetap.				
	Fasilitas Kredit yang diberikan untuk tujuan konsumsi lainnya				
	No	Keterangan	Plafond	Jw/Bln	
	1	Kepala Desa	180.000.000	96	
	2	Kepala Desa TPKPD Pegunungan eks Tanah	200.000.000	96	
	-	Perdikan	200.000.000		
	3	Sekretaris Desa	120.000.000	120	
	4	Sekretaris Desa TPKPD Pegunungan eks Tanah	155.000.000	120	
		Perdikan			
	5	Perangkat Desa	110.000.000	120	
	6	Perangkat Desa TPKPD Pegunungan eks Tanah	145.000.000	120	
		Perdikan			
	• P	eminjam Adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Ka	abupaten Tulunga	gung yang	
	1	angkat dengan Surat Keputusan Pengangkatan seba			
	D	esa oleh Pejabat yang berwenang.			
	• S	uku Bunga Anuitas setara flat 10% pertahun			
Manfaat	Bagi Nasabah				
	Memberikan kemudahan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk				
	m	emperoleh pembiayaan dengan bunga kompetitif.			
	• P	roses pengajuan mudah dan cepat.			
	• A	ngsuran ringan melalui potongan penghasilan tetap	•		
	• So	olusi untuk berbagai kebutuhan			
	• Ti	dak perlu agunan tambahan			
Risiko	Risiko Kredit : Potensi Risiko gagal bayar oleh debitur.				
	Risiko Operasional : Risiko terkait dengan proses penagihan jika debitur gagal				
	b	ayar			
	• R	isiko Hukum terkait proses hukum yang harus dijala	ni jika terjadi wanp	orestasi	
	0	eh debitur			
	• R	isiko Reputasi jika ada kasus gagal bayar yang berula	ang atau Tindakan		
	р	enagihan yang tidak sesuai			
Persyaratan dan tata	• P	eminjam Adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Ka	abupaten Tulunga	gung yang	
cara	diangkat dengan Surat Keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang				
		/arat pengajuan :			
		FC KTP Suami dan Istri			
		FC KK			
		FC Buku Nikah			
	l l	SK Kepala desa dan Perangkat Desa Asli			
	l l	Daftar Siltap			
		FC BPJS		DT DDD	
	1	engajuan dapat dilakukan dengan datang langsung k			
		ank Tulungagung atau menghubungi marketing PT B	ork bank fulungag	ung	
Riava		lelengkapi aplikasi pengajuan kredit			
Biaya		dministrasi : 2% dari plafon kredit.			
		rovisi : 0,5% dari plafon kredit.			
6' 1 '		suransi: sesuai dengan ketentuan			
Simulasi	Contoh Simulasi:				
	1	n kredit Rp 100.000.000,00			
	1	r 10 tahun (120 bulan)	h fl + 400	/	
	Suku	bunga anuitas bulanan 16,8640% pertahun atau set	ara bunga flat 10%	₀ per	

	tahun		
	Angsuran pokok dan bunga perbulan ± Rp1.666.666,00		
	Dengan biaya Provisi 0,5% dari plafond sebesar Rp. 500.000,00		
	Dan biaya Administrasi 2% dari plafond sebesar Rp. 2.000.000,00		
Informasi tambahan	Pelunasan dipercepat akan dikenakan penalty sebesar 5% dari sisa plafond		
	Untuk Top Up dikenakan pinalty 1.5% dari sisa Plafond		
	Disarankan untuk membaca dan memahami seluruh isi perjanjian kredit sebelum		
	penandatanganan.		
	Produk ini hanya untuk Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Tulungagung yang		
	aktif dan memiliki penghasilan tetap.		
Layanan Pengaduan	Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas produk Tabungan Bank		
,	Tulungagung melalui Kantor Pusat PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA,		
	langsung ke Customer Service, atau melalui :		
	Hubungi kami :		
	• Nomor Telepon : 0355 - 323656		
	Whatsapp (Chat Only): 0853 4040 2700		
	Website : www.banktulungagung.co.id		
	Email : bprbankd@gmail.com		
	Media Sosial :		
	Instagram :@banktulungagung		
	YouTube : @banktulungagung		
	Facebook : BPR Bank Tulungagung		
	Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Perlindungan Konsumen		
	yang terintegrasi dengan OJK dan PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA yang		
	terintegrasi dengan OJK dan PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA dengan		
	mengakses: https://kontak157.ojk.go.id/pujk.		

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).